



DOMESTIC POLITICS AND THE REORIENTATION OF THE LOOK EAST POLICY IN THE ERA OF PRESIDENT EBRAHIM RAISI

POLITIK DOMESTIK DAN REORIENTASI LOOK EAST POLICY DI ERA PRESIDEN EBRAHIM RAISI

Asep Kamaluddin Nashir ¹⁾; Rizky Hikmawan ²⁾

¹⁾ asepkamaluddin@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²⁾ rizkyhikmawan@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

This article analyzes the formation of Iran's Look East Policy under the presidency of Ebrahim Raisi by positioning domestic politics as the primary explanatory variable. Departing from approaches that interpret the policy as a reactive response to Western pressure and international sanctions, the article argues that Look East Policy constitutes a structurally produced domestic political outcome. The study employs a layered analytical framework combining ideational power and the bureaucratic politics model within the tradition of Foreign Policy Analysis (FPA), using qualitative library-based research methods. The findings show that the ideological structure constructed by the Supreme Leader shapes the foreign policy legitimacy space (policy space), which is subsequently translated into institutional preferences and consolidated through bureaucratic interactions among the president, the Ministry of Foreign Affairs, and the IRGC. This process produces elite consensus that is crystallized through policy formulation, transforming Look East Policy into an official strategic orientation and institutionalizing it through bilateral relations, non-Western multilateralism, and sectoral cooperation. The article concludes that Look East Policy is a policy ideologically conditioned, bureaucratically produced, and institutionally embedded, in which Western external pressure functions as a triggering context, while domestic political structures determine the direction and character of Iran's foreign policy.

Keywords: *Bureaucratic politics; Domestic politics; Ideational power; Iranian foreign policy; Look East Policy*

Abstrak

Artikel ini menganalisis pembentukan *Look East Policy* Iran di bawah pemerintahan Ebrahim Raisi dengan menempatkan politik domestik sebagai variabel penjelas utama. Berbeda dari pendekatan yang memandang kebijakan ini sebagai respons reaktif terhadap tekanan eksternal Barat dan rezim sanksi internasional, artikel ini berargumen bahwa *Look East Policy* merupakan produk politik domestik yang terstruktur. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis berlapis yang mengombinasikan konsep *ideational power* dan *bureaucratic politics model* dalam tradisi Foreign Policy Analysis (FPA), dengan metode kualitatif berbasis studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur ideologis yang dibangun oleh Pemimpin Tertinggi membentuk ruang legitimasi kebijakan luar negeri (*policy space*), yang kemudian diterjemahkan ke dalam preferensi institusional aktor domestik dan dikonsolidasikan melalui interaksi birokratis antara presiden, Kementerian Luar Negeri, dan IRGC. Proses ini menghasilkan konsensus elite yang dikristalkan dalam formulasi kebijakan, sehingga *Look East Policy* bertransformasi menjadi orientasi strategis resmi negara dan dilembagakan melalui implementasi bilateral, multilateralisme non-Barat, serta kerja sama sektoral. Artikel ini menyimpulkan bahwa *Look East Policy* merupakan kebijakan yang dikondisikan secara ideologis, diproduksi secara birokratis, dan dilembagakan secara institusional, di mana tekanan eksternal Barat berfungsi sebagai konteks pemicu, sementara politik domestik menjadi faktor penentu arah kebijakan luar negeri Iran.

Kata Kunci: *Bureaucratic politics model; Ideational power; Kebijakan luar negeri Iran; Look East Policy; Politik domestik*

PENDAHULUAN

Sejak awal 2000-an, kebijakan luar negeri Iran tidak dapat dilepaskan dari tekanan sanksi ekonomi dan politik yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutu Baratnya. Sanksi tersebut terutama berkaitan dengan program nuklir Iran, kebijakan regional Teheran di Timur Tengah, serta relasinya dengan aktor non-negara, seperti Hizbullah yang dikategorikan sebagai kelompok ekstrimis. Meskipun *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) pada tahun 2015 sempat membuka ruang normalisasi hubungan Iran dengan Barat, penarikan



sepihak AS dari kesepakatan tersebut pada tahun 2018 kembali menempatkan Iran dalam rezim sanksi yang ketat melalui kebijakan *maximum pressure* (Esfandiary & Tabatabai, 2022; Katzman, 2020).

Sejak saat itu, tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Iran meningkat secara signifikan dan mempersempit ruang manuver kebijakan luar negerinya. Dampak sanksi Barat tersebut secara langsung memukul perekonomian Iran. Pembatasan ekspor minyak, pembekuan aset, serta keterbatasan Iran dari sistem keuangan internasional menyebabkan penurunan pendapatan negara, depresiasi mata uang rial, inflasi tinggi, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi (Haidar, 2017; Torbat, 2005). Studi-studi ekonomi politik internasional menunjukkan bahwa sanksi tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga melemahkan sektor industri, mempersempit investasi asing, serta meningkatkan tekanan sosial dan ekonomi domestik (Farzanegan & Raeisian Parvari, 2014; Peksen, 2019). Dalam konteks ini, sanksi menjadi faktor struktural yang terus membayangi stabilitas ekonomi dan legitimasi politik domestik Iran.

Menghadapi tekanan tersebut, Iran secara bertahap mengembangkan *Look East Policy* sebagai alternatif strategis untuk mengurangi tekanan sanksi yang diberikan oleh Barat. Kebijakan ini menekankan penguatan hubungan politik, ekonomi, dan strategis dengan negara-negara non-Barat, khususnya China, Rusia, dan negara-negara Asia lainnya. Dalam kerangka ini, *Look East Policy* dipahami sebagai upaya Iran untuk beradaptasi dengan tatanan internasional yang semakin multipolar, sekaligus mencari mitra ekonomi dan politik yang relatif lebih toleran terhadap tekanan sanksi Barat (Azad, 2022; Hunter & Jones, 2018). Pada era Ebrahim Raisi, kebijakan ini semakin dipertegas melalui perluasan kerja sama strategis dengan China, pendalaman hubungan dengan Rusia, serta keterlibatan aktif Iran dalam forum multilateral non-Barat seperti *Shanghai Cooperation Organisation* (SCO) dan BRICS.

Sejumlah penelitian telah membahas *Look East Policy* Iran dari berbagai perspektif. Beberapa studi menekankan kebijakan ini sebagai respons rasional terhadap tekanan eksternal, khususnya sanksi Barat dan marginalisasi Iran dalam sistem internasional yang didominasi Barat (Azad, 2022; Hunter & Jones, 2018). Studi lain melihat *Look East Policy* sebagai bagian dari strategi *balancing* dan *hedging* Iran dalam menghadapi ketidakpastian global dan perubahan distribusi kekuatan internasional (Esfandiary & Tabatabai, 2022). Penelitian yang secara khusus membahas era Raisi juga cenderung menempatkan *Look East Policy* sebagai kelanjutan logis dari tekanan struktural internasional yang dihadapi Iran, dengan fokus pada dimensi geopolitik dan ekonomi global (Vakil, 2022).

Namun demikian, literatur yang ada masih relatif terbatas dalam menjelaskan dimensi politik domestik di balik *Look East Policy*. Sebagian besar kajian memosisikan Iran sebagai aktor *unitary* yang merespons tekanan eksternal, sementara dinamika internal seperti konsolidasi kekuasaan elite konservatif, meningkatnya peran Korps Garda Revolusi Iran (*Iranian Revolutionary Guard Corps/ IRGC*), serta hubungan antara rezim dan institusi kebijakan luar negeri jarang dianalisis secara sistematis. Padahal pemerintahan Ebrahim Raisi ditandai oleh konsolidasi kekuasaan domestik yang kuat, di mana lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada di bawah dominasi kubu konservatif. Kondisi ini berpotensi membentuk preferensi, batasan, dan arah kebijakan luar negeri Iran secara signifikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mempertanyakan apakah *Look East Policy* di era Raisi semata-mata merupakan respons terhadap tekanan internasional dari Barat, atau justru merupakan produk dari dinamika dan kepentingan aktor domestik Iran? Dengan menggeser fokus analisis dari faktor eksternal ke interaksi antara politik domestik dan kebijakan luar negeri, penelitian ini berupaya mengisi *research gap* dalam literatur *Look East Policy* Iran serta berkontribusi pada kajian *Foreign Policy Analysis* (FPA) yang menekankan pentingnya faktor domestik dalam pembentukan orientasi strategis negara.



KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini dibangun atas asumsi dasar bahwa kebijakan luar negeri tidak dapat dipahami secara memadai sebagai respons mekanis terhadap tekanan sistem internasional, melainkan sebagai produk proses politik domestik yang terstruktur, di mana ideologi, institusi, dan elite politik berinteraksi dalam membentuk orientasi kebijakan negara. Dalam tradisi FPA, kebijakan luar negeri dipahami sebagai hasil interaksi antara struktur ide, aktor domestik, dan proses institusional, bukan semata-mata sebagai output rasional dari negara sebagai aktor tunggal (Hudson, 2005; Kaarbo, 2015).

Secara konseptual, penelitian ini berangkat dari kritik terhadap pendekatan struktural internasional yang cenderung reduksionis karena menjelaskan kebijakan luar negeri terutama sebagai refleksi tekanan eksternal seperti sanksi, distribusi kekuatan, atau struktur sistem internasional. Pendekatan tersebut memang mampu menjelaskan konteks tekanan, tetapi lemah dalam menjelaskan bentuk kebijakan konkret yang dihasilkan, karena mengabaikan proses internal negara (George & Bennett, 2005). Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan politik domestik sebagai variabel kausal utama dengan tekanan eksternal diposisikan sebagai *triggering condition*, bukan sebagai penentu tunggal arah kebijakan.

Kerangka pemikiran penelitian ini mengintegrasikan dua pendekatan utama, yaitu *ideational power* dan *bureaucratic politics model*, dalam sebuah kerangka analisis berlapis (*layered analytical framework*). Pendekatan *ideational power* digunakan untuk menjelaskan bagaimana ide, nilai, dan worldview membentuk struktur makna kebijakan dan ruang legitimasi kebijakan luar negeri (Blyth, 2002). Ide dipahami bukan sebagai refleksi kepentingan material semata, tetapi sebagai kekuatan struktural yang membentuk cara aktor memaknai realitas politik, mendefinisikan kepentingan nasional, dan menentukan batas normatif kebijakan yang dianggap sah (Hay, 2002).

Dalam konteks Iran, struktur ideologis yang dibangun oleh Pemimpin Tertinggi berfungsi sebagai fondasi normatif kebijakan luar negeri, yang membentuk *policy space*, yakni ruang kemungkinan kebijakan yang dapat diproduksi secara politik. Struktur ini membentuk batas legitimasi kebijakan, di mana orientasi non-Barat menjadi sah dan rasional, sementara ketergantungan pada Barat diposisikan sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan identitas politik negara (Hunter, 2010; Wakil, 2022). Dengan demikian, *ideational power* dalam penelitian ini dipahami sebagai **struktur pembentuk arah**, bukan sebagai mekanisme operasional kebijakan.

Namun, struktur ideologis tidak secara otomatis menghasilkan kebijakan konkret. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan *bureaucratic politics model* untuk menjelaskan bagaimana ide dan preferensi diproses dalam arena politik domestik. Dalam model ini, kebijakan luar negeri dipahami sebagai hasil interaksi, negosiasi, dan konsolidasi kepentingan antaraktor institusional yang berada dalam struktur negara (Allison & Zelikow, 1999). Aktor-aktor seperti presiden, Kementerian Luar Negeri, dan IRGC tidak sekadar menjalankan ideologi, tetapi menerjemahkannya ke dalam kepentingan institusional dan memprosesnya melalui mekanisme politik internal (Hudson, 2005).

Kerangka pemikiran ini menempatkan kebijakan luar negeri sebagai hasil dari alur kausal berlapis yang terdiri atas lima tahap, yaitu: (1) struktur ideologis membentuk ruang legitimasi kebijakan; (2) ideologi diterjemahkan menjadi preferensi institusional aktor; (3) preferensi tersebut diproses melalui interaksi birokratis; (4) kebijakan diformulasikan sebagai orientasi negara, dan (5) kebijakan diimplementasikan serta dilembagakan dalam praktik hubungan luar negeri. Alur ini mencerminkan logika *proses tracing*, di mana kebijakan dipahami sebagai hasil rangkaian mekanisme kausal, bukan sebagai output instan (Bennett & Checkel, 2015).



Dalam kerangka ini, *Look East Policy* diposisikan sebagai *policy outcome*, yaitu hasil dari proses politik domestik yang terstruktur. Kebijakan ini tidak dipahami sebagai reaksi teknokratis terhadap tekanan sanksi Barat, tetapi sebagai produk interaksi antara struktur ideologis, aktor institusional, dan konsolidasi elite domestik. Tekanan eksternal berfungsi sebagai konteks pemicu, tetapi arah kebijakan ditentukan oleh bagaimana tekanan tersebut dimaknai dan diproses dalam struktur politik domestik Iran (Hudson, 2005).

Secara konseptual, kerangka pemikiran ini menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Iran di bawah Ebrahim Raisi harus dipahami sebagai ekspresi politik domestik, bukan sekadar respons geopolitik eksternal. Dengan demikian, *Look East Policy* merepresentasikan orientasi kebijakan yang dikondisikan secara ideologis, diproduksi secara birokratis, dan dilembagakan secara institusional. Kerangka ini memungkinkan analisis yang tidak hanya menjelaskan apa kebijakan tersebut, tetapi juga bagaimana dan mengapa kebijakan tersebut terbentuk dalam konfigurasi kekuasaan domestik Iran.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini memperkuat pendekatan FPA yang menempatkan politik domestik sebagai pusat analisis kebijakan luar negeri, sekaligus memperluasnya dengan memasukkan dimensi *ideational power* sebagai struktur pembentuk makna kebijakan. Penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kebijakan luar negeri negara non-Barat, yang sering kali tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh teori-teori struktural internasional yang berorientasi Barat-sentris.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis bagaimana konsolidasi kekuasaan domestik di bawah pemerintahan Ebrahim Raisi membentuk kebijakan luar negeri Iran, khususnya *Look East Policy*. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur hubungan kausal secara statistik, melainkan memahami makna, proses, dan dinamika politik yang melatarbelakangi formulasi kebijakan luar negeri suatu negara (Creswell & Poth, 2018; Denzin & Lincoln, 2005)

Dalam studi Hubungan Internasional, metode kualitatif lazim digunakan untuk menelaah proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, relasi antara aktor domestik dan kebijakan eksternal, serta konstruksi ide dan kepentingan yang tidak selalu dapat direduksi ke dalam variabel kuantitatif (George & Bennett, 2005; Klotz & Prakash, 2008). Pendekatan ini relevan untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Iran yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara tekanan eksternal dan dinamika politik domestik.

Metode studi pustaka digunakan sebagai teknik pengumpulan data utama, dengan memanfaatkan sumber-sumber sekunder yang kredibel dan relevan. Data penelitian diperoleh dari buku akademik, artikel jurnal ilmiah bereputasi, laporan lembaga riset dan *think tanks*, serta dokumen resmi pemerintah Iran yang tersedia untuk publik, seperti pidato presiden, pernyataan Kementerian Luar Negeri, dan dokumen kebijakan luar negeri. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk membangun analisis yang sistematis dengan menelusuri perkembangan konseptual dan empiris kebijakan *Look East* dalam literatur yang ada (Snyder, 2019).

Analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif interpretatif, dengan menekankan pada penelusuran hubungan antara konsolidasi kekuasaan domestik dan orientasi kebijakan luar negeri. Penelitian ini mengadopsi prinsip proses *tracing* secara terbatas untuk mengidentifikasi bagaimana perubahan konfigurasi politik domestik, seperti dominasi elite konservatif dan meningkatnya peran aktor non-sipil yang berkorelasi dengan pergeseran prioritas kebijakan luar negeri Iran (George & Bennett, 2005). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kebijakan luar negeri sebagai hasil dari proses politik, bukan sekadar respons rasional terhadap tekanan sistem internasional.



Untuk menjaga validitas analisis, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, dengan membandingkan argumen dan temuan dari berbagai jenis literatur, akademik, kebijakan, dan dokumen resmi guna mengurangi bias interpretasi dan memperkuat konsistensi analisis (Yin, 2018). Dengan demikian, metode kualitatif berbasis studi pustaka tidak hanya berfungsi sebagai teknik pengumpulan data, tetapi juga sebagai kerangka analitis untuk mengkaji keterkaitan antara politik domestik dan kebijakan luar negeri dalam studi Hubungan Internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Look East Policy

Dalam literatur kebijakan luar negeri Iran, *Look East Policy* (*Siyasat-e Negah be Shargh*) dipahami sebagai strategi reorientasi struktural kebijakan luar negeri yang bertujuan mengalihkan fokus hubungan internasional Iran dari Barat ke kawasan Asia dan Eurasia. Kebijakan ini tidak hanya menyangkut perubahan mitra diplomatik, tetapi juga mencerminkan reposisi Iran dalam struktur sistem internasional yang dipersepsikan semakin multipolar. Hunter (2010) mendefinisikan *Look East Policy* sebagai upaya sistematis Iran untuk membangun hubungan politik, ekonomi, dan keamanan yang lebih intensif dengan kekuatan non-Barat, terutama China, Rusia, dan negara-negara Asia, guna mengurangi kerentanan strategis akibat tekanan Barat.

Secara konseptual, *Look East Policy* dapat dipahami sebagai respons Iran terhadap asimetri kekuasaan dalam sistem internasional yang didominasi Barat, khususnya AS. Dalam perspektif realisme struktural, kebijakan ini mencerminkan strategi *balancing* tidak langsung (*soft balancing*), di mana Iran berusaha menyeimbangkan tekanan hegemonik Barat melalui penguatan jejaring kerja sama dengan kekuatan besar non-Barat, tanpa terlibat dalam konfrontasi militer terbuka (Pape, 2005). Dengan demikian, *Look East Policy* berfungsi sebagai instrumen adaptasi negara terhadap struktur internasional yang tidak menguntungkan.

Namun demikian, *Look East Policy* tidak dapat direduksi semata-mata sebagai kebijakan realistik pragmatis. Azad (2022) menegaskan bahwa kebijakan ini juga memiliki **dimensi** normatif dan ideologis, yang berakar pada narasi anti-hegemoni dan penolakan terhadap dominasi Barat dalam politik global. Dalam diskursus resmi Iran, negara-negara Timur sering direpresentasikan sebagai mitra yang lebih menghormati prinsip kedaulatan, non-intervensi, dan kesetaraan antarnegara sehingga dianggap sejalan dengan pengalaman historis Iran sebagai negara yang kerap menjadi objek intervensi Barat. Oleh karena itu, *Look East Policy* juga berfungsi sebagai narasi legitimasi politik luar negeri bagi rezim, baik di tingkat domestik maupun internasional.

Dari perspektif ekonomi politik internasional, *Look East Policy* dapat dipahami sebagai strategi diversifikasi ekonomi dan institusional di tengah rezim sanksi. Sanksi ekonomi Barat tidak hanya membatasi akses Iran terhadap pasar dan teknologi, tetapi juga mendorong Iran untuk mencari rezim ekonomi alternatif yang tidak sepenuhnya tunduk pada aturan dan institusi yang dipimpin Barat. Dalam konteks ini, kerja sama dengan China dan Rusia dipandang sebagai cara untuk mengintegrasikan Iran ke dalam jaringan ekonomi non-Barat, termasuk proyek infrastruktur, energi, dan mekanisme keuangan alternatif (Hunter & Jones, 2018). Dengan kata lain, *Look East* merupakan bentuk *institutional bypassing* terhadap tatanan ekonomi global yang eksklusif.

Lebih jauh, dalam kerangka FPA, *Look East Policy* mencerminkan interaksi antara tekanan eksternal dan preferensi politik domestik. Wakil (2022) menunjukkan bahwa kebijakan ini memperoleh legitimasi yang lebih kuat ketika elite politik konservatif dan institusi keamanan Iran, termasuk IRGC, memiliki pengaruh dominan dalam pengambilan keputusan. Bagi kelompok ini, orientasi ke Timur bukan hanya soal efisiensi kebijakan luar negeri, tetapi



juga tentang menjaga otonomi ideologis rezim dari pengaruh normatif Barat, seperti isu demokrasi, HAM, dan liberalisasi politik.

Dengan demikian, secara konseptual *Look East Policy* dapat dipahami sebagai kebijakan luar negeri multidimensional yang mencakup: (1) strategi geopolitik untuk menyeimbangkan dominasi Barat; (2) strategi ekonomi untuk bertahan dalam rezim sanksi; dan (3) strategi ideologis untuk memperkuat narasi anti-hegemoni dan legitimasi rezim. Pemahaman ini penting karena menunjukkan bahwa *Look East Policy* bukanlah kebijakan reaktif jangka pendek, melainkan bagian dari orientasi strategis jangka panjang Iran dalam menghadapi perubahan struktur kekuasaan global.

Dinamika Politik Domestik Iran dalam Membentuk Arah *Look East Policy*

Implementasi *Look East Policy* di era kepemimpinan Ebrahim Raisi (2021–2024) menunjukkan pendalaman dan institusionalisasi orientasi ke Timur yang sebelumnya telah muncul secara gradual sejak era Mahmoud Ahmadinejad dan Hassan Rouhani. Namun, berbeda dari pendahulunya, Raisi tidak lagi memosisikan *Look East Policy* sebagai pelengkap diplomasi Iran, melainkan sebagai poros utama kebijakan luar negeri. Hal ini mencerminkan perubahan signifikan dalam prioritas strategis Iran, terutama di tengah stagnasi negosiasi nuklir dengan Barat dan berlanjutnya rezim sanksi ekonomi Amerika Serikat (Vakil, 2022).

Secara praktis, pemerintahan Raisi memaknai *Look East Policy* sebagai strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan strategis negara. Dalam diskursus resmi pemerintah, orientasi ke Timur dipresentasikan sebagai upaya “menetralisasi sanksi” (*neutralizing sanctions*) alih-alih mencabutnya melalui negosiasi dengan Barat. Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma kebijakan luar negeri Iran dari *sanctions relief-oriented diplomacy* menuju *sanctions resistance-oriented diplomacy* (Esfandiary & Tabatabai, 2022).

Namun sebagaimana yang diketahui, Iran memiliki sistem pemerintahan unik yang disebut *Wilāyat al-Faqīh (Velayat-e Faqih)*. Sistem ini tidak menjadikan presiden sebagai pemimpin tertinggi, melainkan seorang *rahbar* atau *supreme leader* atau pemimpin tertinggi yang dipegang oleh Ayatullah Khamanei sejak tahun 1989. Bahkan Ayatullah Khamanei juga memegang jabatan sebagai panglima tertinggi militer sekaligus pimpinan dari IRGC. Dengan demikian proses perumusan kebijakan pemerintah tidak mutlak di tangan presiden, melainkan ada unsur pengaruh dari *rahbar*. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan *Look East Policy*.

Selain itu, implementasi *Look East Policy* di era Raisi sangat dipengaruhi oleh konsolidasi kekuasaan elite konservatif dan institusi keamanan, terutama IRGC. IRGC memiliki kepentingan langsung dalam memperluas kerja sama dengan negara-negara Timur, baik dalam sektor energi, logistik, maupun pertahanan, yang relatif lebih bebas dari pengawasan dan tekanan normatif Barat. Dengan demikian, kebijakan *Look East* tidak hanya mencerminkan orientasi eksternal Iran, tetapi juga kepentingan ekonomi-politik aktor domestik yang dominan dalam struktur kekuasaan pasca terpilihnya Raisi (Hunter, 2010; Vakil, 2022).

Pemerintahan Raisi secara aktif turut membingkai implementasi *Look East Policy* sebagai kebijakan luar negeri berbasis kedaulatan dan keadilan global. Retorika ini digunakan untuk membedakan pendekatan Raisi dari diplomasi era Rouhani yang dianggap terlalu bergantung pada Barat dan perjanjian nuklir JCPOA. Dalam narasi resmi negara, orientasi ke Timur dipresentasikan sebagai pilihan rasional dan bermartabat yang mencerminkan identitas Iran sebagai negara yang menolak subordinasi terhadap kekuatan hegemonik (Azad, 2022).

Dengan demikian, implementasi *Look East Policy* di era Ebrahim Raisi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai respons teknis terhadap tekanan internasional. Sebaliknya, kebijakan ini merupakan hasil interaksi antara tekanan struktural sistem internasional, preferensi ideologis elite domestik, dan konsolidasi kekuasaan politik internal. Pendekatan ini menjadikan *Look East Policy* sebagai elemen sentral dalam proyek restrukturisasi kebijakan luar negeri Iran menuju tatanan global yang dipersepsikan semakin multipolar dan pasca-Barat.



Setidaknya ada lima tahap pembentukan *Look East Policy* yang dipengaruhi oleh dinamika politik domestik Iran. *Pertama*, pembentukan struktur ideologis kebijakan luar negeri yang dikonstruksikan oleh Ayatullah Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran. Struktur ini tidak hadir dalam bentuk kebijakan teknokratis atau dokumen strategis operasional, melainkan sebagai kerangka berpikir ideologis (*worldview*) yang membentuk cara negara memaknai sistem internasional, mendefinisikan ancaman, serta menentukan batas normatif kebijakan luar negeri yang dianggap sah dan tidak sah. Dalam literatur kebijakan luar negeri Iran, peran Pemimpin Tertinggi dipahami bukan sebagai *policy maker* teknis, melainkan sebagai pembentuk orientasi ideologis dan legitimasi strategis kebijakan negara (Hunter, 2010; Wakil, 2022).

Struktur ideologis ini berakar pada narasi konsisten Khamenei mengenai anti-hegemoni Barat, penolakan terhadap dominasi AS dalam tatanan internasional, serta kritik terhadap sistem global liberal yang dianggap eksploitatif dan tidak adil bagi negara-negara berkembang. Dalam berbagai pidato dan pernyataan resmi, Barat direpresentasikan sebagai aktor hegemonik yang menggunakan institusi internasional, ekonomi global, dan norma politik liberal sebagai instrumen dominasi struktural. Narasi ini membentuk konstruksi diskursif bahwa ketergantungan pada Barat bukan sekadar persoalan kebijakan luar negeri, tetapi merupakan ancaman terhadap kedaulatan, identitas, dan otonomi politik Iran (Hunter & Jones, 2018).

Salah satu manifestasi utama dari struktur ideologis ini adalah doktrin “*Resistance Economy*” (*Eghtesad-e Moqavemati*) yang dikembangkan dan dipromosikan langsung oleh Khamenei sebagai paradigma ekonomi-politik negara. Doktrin ini menekankan kemandirian ekonomi, diversifikasi mitra internasional, pengurangan ketergantungan terhadap Barat, serta pembangunan ketahanan nasional terhadap tekanan eksternal dan sanksi (Kamrava, 2012). Dalam konteks kebijakan luar negeri, *resistance economy* tidak hanya berfungsi sebagai strategi ekonomi domestik, tetapi juga sebagai landasan normatif bagi orientasi kebijakan luar negeri non-Barat, dengan memposisikan kerja sama dengan dunia Timur dan *Global South* sebagai pilihan yang sah dan strategis (Hunter & Jones, 2018).

Lebih jauh, Khamenei secara konsisten mengartikulasikan visi tatanan dunia multipolar sebagai alternatif terhadap unipolaritas AS. Dunia internasional dipahami bukan sebagai sistem yang netral, tetapi sebagai arena dominasi struktural yang harus dilawan melalui pembangunan aliansi, solidaritas *Global South*, dan penguatan kerja sama antarnegara non-Barat. Dalam kerangka ini, Timur, baik Asia, Eurasia, maupun *Global South*, tidak hanya dipahami sebagai wilayah geografis, tetapi sebagai ruang ideologis alternatif yang secara normatif lebih kompatibel dengan prinsip kedaulatan, non-intervensi, dan resistensi terhadap hegemoni Barat (Esfandiary & Tabatabai, 2022).

Secara teoritis, struktur ideologis yang dibentuk oleh Khamenei dapat dipahami sebagai bentuk *ideational power*, yaitu kekuasaan yang bekerja melalui pembentukan makna, nilai, dan kerangka interpretasi realitas politik (Blyth, 2002). *Ideational power* tidak menghasilkan kebijakan langsung, tetapi membentuk ruang kemungkinan kebijakan (*policy space*), yakni batasan normatif yang menentukan pilihan kebijakan mana yang dianggap sah, rasional, dan dapat diterima secara politik. Dalam konteks ini, *Look East Policy* tidak muncul sebagai kebijakan yang “diperintahkan” oleh Khamenei, melainkan sebagai kebijakan yang menjadi mungkin secara ideologis karena berada dalam struktur makna yang telah dibentuk sebelumnya.

Dengan demikian, pembentukan struktur ideologis oleh Khamenei berfungsi sebagai fondasi normatif bagi orientasi kebijakan luar negeri Iran. Struktur ini tidak menghasilkan kebijakan konkret, tetapi membentuk kerangka legitimasi yang memungkinkan aktor-aktor domestik lain, seperti presiden, kementerian luar negeri, dan IRGC untuk mengartikulasikan dan memformulasikan *Look East Policy* sebagai pilihan kebijakan yang sah, rasional, dan strategis. Dalam kerangka ini, *Look East Policy* dipahami bukan sebagai respons teknokratis



semata terhadap tekanan sanksi Barat, tetapi sebagai ekspresi kebijakan yang berakar pada struktur ideologis rezim yang telah terbangun secara historis.

Kedua, translasi struktur ideologis tersebut ke dalam preferensi kebijakan aktor institusional domestik. Pada tahap ini, ide dan nilai tidak lagi berada pada level abstrak normatif, tetapi mulai mengalami proses internalisasi institusional, yaitu ketika kerangka ideologis diterjemahkan menjadi orientasi kebijakan yang dapat diproses oleh lembaga-lembaga negara. Dalam literatur FPA, tahap ini dipahami sebagai proses di mana ide berubah menjadi preferensi dan preferensi menjadi dasar tindakan politik (Kaarbo, 2015).

Translasi ini tidak berlangsung secara mekanis atau linier, melainkan melalui proses penyesuaian institusional dan penyesuaian kepentingan. Struktur ideologis anti-hegemoni, resistensi terhadap Barat, dan orientasi non-Barat yang dibentuk oleh Pemimpin Tertinggi membentuk kerangka interpretatif bersama (*shared interpretive framework*) bagi aktor-aktor domestik. Dalam kerangka ini, pilihan kebijakan luar negeri tidak lagi dipersepsikan sebagai spektrum terbuka, tetapi sebagai ruang pilihan terbatas yang telah dikondisikan secara ideologis (Hay, 2002).

Pada level presiden, struktur ideologis ini diterjemahkan menjadi preferensi kebijakan strategis yang menekankan diversifikasi mitra internasional, pengurangan ketergantungan terhadap Barat, serta penguatan kerja sama dengan dunia non-Barat. Dalam konteks pemerintahan Ebrahim Raisi, orientasi ini terlihat dalam pergeseran narasi kebijakan luar negeri menuju diplomasi alternatif mencari sumber keuangan baru yang mengurangi dampak negatif sanksi yang diterima saat ini. Pada tahap ini, ideologi anti-hegemoni tidak lagi hadir sebagai wacana normatif semata, tetapi telah menjadi preferensi kebijakan operasional presiden.

Di tingkat Kementerian Luar Negeri, struktur ideologis tersebut mengalami proses teknokratisasi, yaitu ketika orientasi normatif diterjemahkan ke dalam kerangka kebijakan diplomatik yang konkret. Preferensi non-Barat mulai diartikulasikan dalam bentuk prioritas hubungan bilateral dan multilateral, agenda diplomasi regional, serta desain kerja sama internasional yang berfokus pada Asia, Eurasia, dan Global South. Proses ini mencerminkan apa yang dalam literatur disebut sebagai *institutional adaptation*, yakni kemampuan institusi negara untuk menyesuaikan fungsi dan orientasinya dengan struktur ideologis dominan (Kaarbo, 2015).

Sementara itu, bagi IRGC, translasi struktur ideologis berlangsung melalui mekanisme sekuritisasi preferensi. Narasi resistensi dan anti-hegemoni diterjemahkan menjadi orientasi keamanan yang menekankan kemandirian strategis, penolakan ketergantungan terhadap Barat, serta pembangunan jejaring keamanan non-Barat. Dalam kerangka ini, kerja sama dengan aktor non-Barat tidak hanya dipahami sebagai pilihan diplomatik, tetapi sebagai kepentingan keamanan strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas rezim dan daya tahan negara terhadap tekanan eksternal (Esfandiary & Tabatabai, 2022; Hunter & Jones, 2018).

Secara analitis, tahap translasi ini menunjukkan bahwa struktur ideologis tidak bekerja secara deterministik, melainkan melalui proses internalisasi institusional yang menghasilkan variasi preferensi aktor. Presiden menerjemahkannya dalam bentuk orientasi politik eksekutif, Kementerian Luar Negeri dalam bentuk desain diplomasi, dan IRGC dalam bentuk kepentingan keamanan strategis. Namun, meskipun bentuknya berbeda, ketiganya beroperasi dalam kerangka makna yang sama, sehingga preferensi kebijakan mereka cenderung konvergen pada orientasi non-Barat.

Dalam perspektif teoritis, tahap ini mencerminkan mekanisme yang dijelaskan dalam literatur *ideational institutionalism*, di mana ide membentuk preferensi aktor melalui proses kognitif dan institusional. bukan melalui paksaan langsung (Blyth, 2002). Struktur ideologis berfungsi sebagai *interpretive filter* yang membentuk cara aktor memahami realitas internasional dan mendefinisikan kepentingan nasional. Dengan demikian, preferensi kebijakan



non-Barat bukan sekadar hasil kalkulasi rasional material, tetapi juga hasil konstruksi ideologis yang terinternalisasi dalam institusi negara.

Tahap translasi ini menjadi jembatan penting antara struktur ideologis dan proses politik domestik. Tanpa tahap ini, struktur ideologis akan tetap berada pada level wacana normatif, dan kebijakan luar negeri akan sulit dijelaskan sebagai produk politik domestik. Melalui translasi institusional, struktur ideologis berubah menjadi preferensi kebijakan nyata yang kemudian masuk ke arena interaksi birokratis dan diproses dalam mekanisme formulasi kebijakan. Dalam kerangka ini, *Look East Policy* mulai muncul bukan lagi sebagai ide, tetapi sebagai preferensi kebijakan yang terdistribusi di dalam institusi negara, menunggu proses konsolidasi dan formulasi lebih lanjut.

Ketiga, interaksi birokratis antar aktor domestik yang berlangsung dalam arena politik internal negara. Pada tahap ini, preferensi kebijakan yang telah terbentuk tidak secara otomatis menjadi kebijakan negara, tetapi harus melalui proses interaksi, negosiasi, penyelarasan kepentingan, dan konsolidasi elite di dalam struktur institusional. Dalam tradisi FPA, tahap ini dipahami sebagai inti dari *bureaucratic politics model* yang memandang kebijakan luar negeri sebagai hasil dari proses politik domestik, bukan sebagai produk keputusan aktor tunggal yang rasional (Allison & Zelikow, 1999)

Interaksi birokratis ini melibatkan aktor-aktor utama negara, yaitu presiden, Kementerian Luar Negeri, dan IRGC yang masing-masing memiliki posisi struktural, sumber daya, dan kepentingan yang berbeda. Presiden berperan sebagai aktor politik formal dengan legitimasi elektoral dan otoritas eksekutif, Kementerian Luar Negeri sebagai aktor teknokratis yang mengelola desain diplomasi dan hubungan internasional, serta IRGC sebagai aktor keamanan-strategis dengan pengaruh besar dalam isu pertahanan, geopolitik regional, dan ekonomi politik negara (Hunter, 2010). Perbedaan posisi ini menjadikan proses formulasi kebijakan luar negeri sebagai arena bargaining institusional, bukan sebagai proses hierarkis yang linear.

Dalam kerangka ini, preferensi kebijakan non-Barat yang telah terbentuk pada tahap sebelumnya masuk ke dalam arena *agenda setting* domestik di mana berbagai aktor berupaya memprioritaskan kepentingan mereka dalam desain kebijakan luar negeri. Presiden, dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan, memainkan peran penting dalam membingkai orientasi kebijakan luar negeri sebagai agenda politik nasional, termasuk dalam membangun legitimasi publik dan simbolisme politik kebijakan (Vakil, 2022). Kementerian Luar Negeri, pada saat yang sama, berupaya menerjemahkan orientasi tersebut ke dalam kerangka kerja diplomasi yang operasional dan terkoordinasi, sementara IRGC mendorong dimensi keamanan dan geopolitik sebagai prioritas strategis dalam hubungan luar negeri (Esfandiary & Tabatabai, 2022).

Proses ini menghasilkan dinamika negosiasi dan penyelarasan kepentingan (*interest alignment*), di mana aktor-aktor institusional tidak selalu berada dalam posisi konflik terbuka, tetapi juga membentuk koalisi kepentingan berdasarkan irisan strategis yang sama. Dalam konteks pemerintahan Raisi, konsolidasi elite konservatif dan penguatan aktor-aktor keamanan menciptakan konvergensi preferensi yang relatif kuat terhadap orientasi kebijakan non-Barat (Vakil, 2022). Hal ini mengurangi fragmentasi internal dan mempercepat proses pembentukan konsensus elite mengenai arah kebijakan luar negeri.

Dalam perspektif teoritis, tahap ini mencerminkan apa yang disebut Allison dan Zelikow (1999) sebagai *politics of decision-making*, di mana kebijakan merupakan hasil dari interaksi kekuasaan antaraktor yang memiliki akses berbeda terhadap sumber daya politik, informasi, dan legitimasi. Kebijakan luar negeri tidak muncul sebagai hasil kalkulasi rasional tunggal, tetapi sebagai kompromi institusional yang dihasilkan melalui proses politik domestik. Dalam konteks Iran, proses ini tidak bersifat demokratis dalam arti liberal, tetapi tetap



mencerminkan politik elite yang kompleks, di mana kekuasaan tersebar di berbagai institusi negara (Hunter, 2010).

Lebih jauh, konsolidasi elite pada era Raisi memperkuat dimensi dominasi institusional dalam proses birokratis. Ketika aktor-aktor kunci negara berbagi orientasi ideologis dan preferensi strategis yang relatif seragam, proses bargaining cenderung menghasilkan kebijakan yang koheren dan terpusat. Hal ini berbeda dengan periode sebelumnya di mana fragmentasi elite lebih tinggi dan orientasi kebijakan luar negeri lebih plural (Vakil, 2022). Dengan demikian, interaksi birokratis pada masa Raisi tidak hanya mencerminkan negosiasi antaraktor, tetapi juga proses konsolidasi kekuasaan yang memproduksi stabilitas orientasi kebijakan.

Tahap interaksi birokratis ini berfungsi sebagai jembatan kausal antara preferensi institusional dan formulasi kebijakan negara. Preferensi yang sebelumnya tersebar di berbagai aktor mulai dikonsolidasikan menjadi orientasi kolektif negara melalui mekanisme koordinasi institusional dan konsensus elite. Dalam kerangka ini, *Look East Policy* mulai bertransformasi dari preferensi aktor menjadi agenda kebijakan negara yang terkoordinasi, meskipun belum sepenuhnya terformalkan sebagai orientasi strategis resmi.

Dengan demikian, tahap interaksi birokratis dan konsolidasi elite menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Iran bukan hasil dari satu aktor dominan, tetapi merupakan produk dari proses politik domestik yang terstruktur, di mana kekuasaan, kepentingan, dan ide berinteraksi dalam arena institusional. Tahap ini menjadi kunci untuk memahami bagaimana *Look East Policy* tidak hanya menjadi wacana ideologis atau preferensi institusional, tetapi mulai mengambil bentuk sebagai orientasi kebijakan kolektif negara.

Keempat, formulasi kebijakan, yaitu proses ketika preferensi institusional dan konsensus elite dikristalkan menjadi orientasi kebijakan resmi negara. Pada tahap ini, kebijakan luar negeri tidak lagi berada pada level wacana ideologis atau preferensi aktor, tetapi telah mengalami proses artikulasi strategis, legitimasi institusional, dan formalisasi politik sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman orientasi kebijakan luar negeri Iran. Dalam literatur FPA, tahap ini dipahami sebagai transisi dari *policy preference* menuju *policy orientation*, yakni dari kecenderungan aktor menuju arah kebijakan negara yang terkoordinasi (Hudson, 2005).

Dalam konteks Iran di bawah pemerintahan Ebrahim Raisi, formulasi *Look East Policy* ditandai oleh pergeseran paradigma kebijakan luar negeri dari orientasi negosiasi Barat (*West-oriented diplomacy*) menuju orientasi non-Barat (*non-Western strategic alignment*). Kebijakan luar negeri tidak lagi difokuskan pada pencabutan sanksi melalui rekonsiliasi dengan Barat, tetapi diarahkan pada pembangunan ketahanan strategis melalui penguatan jejaring kerja sama dengan dunia non-Barat. Perubahan ini menunjukkan bahwa *Look East Policy* bukan sekadar kebijakan sektoral, tetapi telah diformulasikan sebagai kerangka orientasi strategis kebijakan luar negeri negara.

Proses formulasi ini berlangsung melalui mekanisme *policy framing*, yaitu pembingkai kebijakan dalam diskursus resmi negara sebagai pilihan rasional, sah, dan strategis. Pemerintahan Raisi secara sistematis membingkai orientasi non-Barat sebagai solusi struktural terhadap tekanan eksternal, khususnya sanksi ekonomi Barat, dengan menekankan narasi kemandirian, kedaulatan, dan multipolaritas global (Esfandiary & Tabatabai, 2022). Dalam kerangka ini, kerja sama dengan China, Rusia, dan dunia non-Barat tidak lagi dipresentasikan sebagai kebijakan alternatif, tetapi sebagai poros utama kebijakan luar negeri.

Formulasi kebijakan juga melibatkan proses *institutional endorsement*, yaitu legitimasi kebijakan oleh lembaga-lembaga negara sebagai orientasi resmi. Presiden sebagai kepala eksekutif memberikan legitimasi politik terhadap orientasi *Look East* melalui pidato resmi, agenda diplomasi, dan prioritas kebijakan luar negeri. Kementerian Luar Negeri kemudian mengintegrasikan orientasi ini ke dalam desain kebijakan diplomatik, sementara IRGC



memperkuat dimensi keamanan dan geopolitiknya dalam kerangka orientasi yang sama. Melalui proses ini, *Look East Policy* mengalami normalisasi institusional sebagai arah kebijakan yang diterima dan dipraktikkan lintas lembaga.

Secara teoritis, tahap formulasi ini mencerminkan mekanisme *policy institutionalization*, di mana kebijakan tidak hanya diproduksi sebagai keputusan politik, tetapi ditanamkan ke dalam struktur institusional negara sebagai kerangka orientasi jangka menengah dan panjang (Hudson, 2005). *Look East Policy* tidak lagi dipahami sebagai respons situasional terhadap tekanan sanksi, tetapi sebagai doktrin strategis yang membentuk pola hubungan luar negeri Iran secara sistemik. Lebih jauh, formulasi *Look East Policy* juga memiliki dimensi diskursif legitimatif. Kebijakan ini diproduksi dan direproduksi melalui narasi resmi negara sebagai kebijakan bermartabat, berdaulat, dan anti-hegemonik, sehingga memperoleh legitimasi simbolik baik di tingkat domestik maupun internasional (Esfandiary & Tabatabai, 2022). Dengan demikian, formulasi kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat konstruksi makna politik, yang menempatkan orientasi non-Barat sebagai identitas kebijakan luar negeri Iran.

Dalam kerangka analisis ini, formulasi *Look East Policy* dapat dipahami sebagai kristalisasi dari seluruh proses domestik sebelumnya. Struktur ideologis membentuk ruang legitimasi, preferensi institusional membentuk orientasi aktor, interaksi birokratis membentuk konsensus elite, dan pada tahap formulasi kebijakan, seluruh elemen tersebut dikonsolidasikan menjadi orientasi strategis kebijakan luar negeri negara. Dengan demikian, *Look East Policy* muncul bukan sebagai kebijakan reaktif jangka pendek, tetapi sebagai hasil institusionalisasi politik domestik yang membentuk arah kebijakan luar negeri Iran secara struktural.

Kelima, implementasi dan institusionalisasi kebijakan, yaitu fase ketika *Look East Policy* tidak lagi beroperasi sebagai orientasi normatif atau kerangka strategis semata, tetapi diwujudkan dalam tindakan kebijakan konkret, pola hubungan internasional yang stabil, serta struktur institusional yang relatif permanen. Pada tahap ini, kebijakan luar negeri mengalami transformasi dari *policy orientation* menjadi *policy structure*, yakni dari arah kebijakan menjadi pola kebijakan yang terlembaga dalam praktik hubungan luar negeri negara (Kaarbo, 2015).

Implementasi *Look East Policy* pada era Ebrahim Raisi tercermin dalam reorientasi hubungan bilateral, multilateralisme alternatif, dan kerja sama sektoral non-Barat. Pada level bilateral, kebijakan ini diwujudkan melalui pendalaman kemitraan strategis dengan negara-negara non-Barat utama, khususnya China dan Rusia, yang diposisikan sebagai mitra struktural dalam pembangunan ketahanan ekonomi-politik Iran di bawah rezim sanksi. Hubungan ini tidak lagi bersifat ad hoc, tetapi berkembang sebagai relasi strategis jangka menengah dan panjang yang melibatkan sektor energi, infrastruktur, keamanan, dan konektivitas regional (Hunter & Jones, 2018).

Pada level multilateral, institusionalisasi *Look East Policy* tampak dalam integrasi Iran ke dalam organisasi dan forum multilateral non-Barat seperti SCO dan BRICS. Keanggotaan dan partisipasi aktif dalam forum-forum ini menunjukkan bahwa orientasi non-Barat tidak hanya diekspresikan melalui hubungan bilateral, tetapi juga melalui arsitektur institusional alternatif yang menempatkan Iran dalam jaringan kerja sama Global South dan Eurasia. Dalam perspektif kebijakan luar negeri, multilateralisme non-Barat ini berfungsi sebagai mekanisme kolektif untuk memperluas legitimasi internasional Iran di luar orbit Barat serta memperkuat posisi tawar strategisnya dalam sistem internasional multipolar (Esfandiary & Tabatabai, 2022).

Di tingkat sektoral, implementasi *Look East Policy* terwujud dalam penguatan kerja sama di bidang energi, keamanan, perdagangan, dan infrastruktur, yang membentuk pola kebijakan lintas sektor yang relatif konsisten. Sektor energi menjadi jangkar utama relasi non-Barat, sementara kerja sama keamanan dan konektivitas regional memperkuat dimensi geopolitik kebijakan tersebut (Hunter & Jones, 2018). Pola ini menunjukkan bahwa *Look East*



Policy tidak diimplementasikan sebagai kebijakan tunggal, tetapi sebagai paket kebijakan terintegrasi yang membentuk orientasi kebijakan luar negeri secara struktural.

Secara teoritis, tahap ini mencerminkan mekanisme *policy institutionalization*, di mana kebijakan tidak lagi bergantung pada preferensi individu aktor, tetapi tertanam dalam struktur organisasi, rutinitas institusional, dan pola kebijakan yang berulang (Blyth, 2002). Ketika suatu orientasi kebijakan telah terinstitusionalisasi, ia tidak mudah berubah meskipun terjadi pergantian aktor, karena telah menjadi bagian dari logika kerja institusi dan struktur hubungan luar negeri negara. Dalam konteks ini, *Look East Policy* mulai berfungsi sebagai orientasi kebijakan luar negeri yang terstruktur, bukan sekadar strategi pemerintahan Raisi semata.

Lebih jauh, institusionalisasi kebijakan juga memiliki dimensi diskursif dan simbolik. *Look East Policy* tidak hanya diimplementasikan melalui kebijakan konkret, tetapi juga melalui produksi dan reproduksi narasi resmi negara tentang multipolaritas, kedaulatan, anti-hegemoni, dan solidaritas Global South. Narasi ini membentuk legitimasi simbolik kebijakan, sehingga *Look East Policy* tidak hanya berfungsi secara instrumental, tetapi juga sebagai **identitas** kebijakan luar negeri Iran di tingkat internasional.

Dengan demikian, tahap implementasi dan institusionalisasi menandai transformasi *Look East Policy* dari hasil proses politik domestik menjadi struktur kebijakan luar negeri yang relatif stabil. Kebijakan ini tidak lagi bergantung pada dinamika politik jangka pendek, tetapi tertanam dalam jaringan hubungan internasional, mekanisme institusional, dan pola kebijakan lintas sektor yang membentuk orientasi kebijakan luar negeri Iran secara berkelanjutan. Dalam kerangka penelitian ini, tahap ini menunjukkan bahwa *Look East Policy* bukan kebijakan reaktif sesaat terhadap tekanan Barat, melainkan produk institusionalisasi politik domestik yang membentuk arah kebijakan luar negeri Iran secara struktural dan jangka panjang.

PENUTUP

Simpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa *Look East Policy* Iran di bawah pemerintahan Ebrahim Raisi tidak dapat dipahami secara memadai sebagai respons reaktif semata terhadap tekanan eksternal Barat, khususnya rezim sanksi ekonomi internasional. Sebaliknya, kebijakan tersebut merupakan produk politik domestik yang terstruktur, yang terbentuk melalui interaksi berlapis antara struktur ideologis, preferensi institusional aktor domestik, dan mekanisme politik internal negara. Hal ini menegaskan bahwa orientasi kebijakan luar negeri Iran merupakan hasil proses politik domestik yang kompleks.

Look East Policy merupakan kebijakan yang dikondisikan secara ideologis, diproduksi secara birokratis, dan dilembagakan secara institusional. Penelitian ini menegaskan bahwa studi kebijakan luar negeri Iran tidak cukup dilakukan melalui analisis geopolitik eksternal semata, tetapi harus memperhitungkan dinamika politik domestik, struktur ideologis rezim, dan konfigurasi elite sebagai faktor kausal utama. Dengan kerangka ini, *Look East Policy* dapat dipahami bukan sekadar sebagai strategi alternatif terhadap Barat, tetapi sebagai ekspresi struktural dari politik domestik Iran yang membentuk arah kebijakannya secara jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, G., & Zelikow, P. (1999). *Essence of decision: Explaining the Cuban Missile Crisis* (2nd ed.). Longman.
- Azad, S. (2022). Looking-East in the Iranian Foreign Policy: The Politico-Ideological Inclinations and Practical Imperatives. *Journal of Globalization Studies*, 13(2), 53–75. <https://doi.org/10.30884/jogs/2022.02.04>



- Bennett, A., & Checkel, J. T. (2015). *Process tracing and the social sciences: From metaphor to analytic tool*. Cambridge University Press.
- Blyth, M. (2002). *Great transformations: Economic ideas and institutional change in the twentieth century*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511489046>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). *The Sage Handbook of Qualitative Research* (N. K. Denzin & Y. S. Lincoln, Eds.; 3rd ed.). Sage Publications.
- Esfandiary, D., & Tabatabai, A. (2022). *Triple-axis: Iran's relations with Russia and China*. I.B. Tauris.
- Farzanegan, M. R., & Raeisian Parvari, M. (2014). Iranian-Oil-Free Zone and international oil prices. *Energy Economics*, 45, 364–372. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2014.08.004>
- George, A. L., & Bennett, A. (2005). *Case studies and theory development in the social sciences*. MIT Press.
- Haidar, J. I. (2017). Sanctions and export deflection: evidence from Iran. *Economic Policy*, 32(90), 319–355.
- Hay, C. (2002). *Political analysis: A critical introduction*. Palgrave Macmillan.
- Hudson, V. M. (2005). Foreign policy analysis: Actor-specific theory and the ground of international relations. *Foreign Policy Analysis*, 1(1), 1–30.
<https://doi.org/10.1111/j.1743-8594.2005.00001.x>
- Hunter, S. (2010). *Iran's foreign policy in the post-Soviet era: Resisting the new international order*. Praeger.
- Hunter, S., & Jones, J. (2018). *Iran's foreign policy in the post-Soviet era*. Praeger.
- Kaarbo, J. (2015). A foreign policy analysis perspective on the domestic politics turn in IR theory. *International Studies Review*, 17(2), 189–216.
<https://doi.org/10.1111/misr.12213>
- Kamrava, M. (2012). Iran's political economy of resistance. *Middle East Policy*, 19(3), 1–15.
<https://doi.org/10.1111/j.1475-4967.2012.00542.x>
- Katzman, K. (2020). *Iran's Foreign and Defense Policies*. <https://crsreports.congress.gov>
- Klotz, A., & Prakash, D. (2008). *Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide* (A. Klotz & D. Prakash, Eds.). Palgrave Macmillan.
- Pape, R. A. (2005). Soft Balancing against the United States. *International Security*, 30(1), 7–45.
- Peksen, D. (2019). When Do Imposed Economic Sanctions Work? A Critical Review of the Sanctions Effectiveness Literature. *Defence and Peace Economics*, 30(6), 635–647.
<https://doi.org/10.1080/10242694.2019.1625250>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Torbat, A. E. (2005). Impacts of the US Trade & Financial Sanctions on Iran. *The World Economy*, 28(3), 407–434.
- Vakil, S. (2022, September 28). Iran protests highlight its crisis of legitimacy. <https://www.Chathamhouse.Org/2022/09/Iran-Prottests-Highlight-Its-Crisis-Legitimacy>.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Sage.